



Optimization of Ship Agency Services of PT. Putra Andalas Samudera in the Management of Construction Safety Certificates at KSOP Dumai

Optimalisasi Pelayanan Keagenan Kapal PT. Putra Andalas Samudera Dalam Pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Di KSOP Dumai

Soliaro Jaloho^{1*}, Fadiyah Hani Sabila²

^{1,2}Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Email: soliarodumai@gmail.com

Email: fadiyahanis@gmail.com

*Corresponding Author:

soliarodumai@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang oleh PT. Putra Andalas Samudera di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai. Sertifikat ini merupakan dokumen vital untuk menjamin kelaiklautan kapal sesuai standar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen selama praktik kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengurusan dilakukan secara digital melalui Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL). Meskipun sistem telah terintegrasi, ditemukan beberapa kendala utama, yaitu: (1) kesalahan pengunggahan dokumen oleh pemohon, (2) ukuran file dokumen yang terlalu besar sehingga sulit terbaca sistem, (3) ketidakstabilan jaringan internet yang menyebabkan gangguan server, dan (4) keterlambatan lampiran dokumen terbaru yang memicu revisi ulang. Upaya optimalisasi dilakukan melalui peningkatan ketelitian validasi dokumen sebelum pengunggahan dan koordinasi intensif antara pihak agen, pemilik kapal, dan petugas pemeriksa kapal (Marine Inspector) guna memastikan kelancaran inspeksi fisik dan penerbitan sertifikat tepat waktu.

Kata Kunci: Keagenan Kapal, KSOP Dumai, Pelayanan, Sertifikat Keselamatan Konstruksi.

Abstract

This study aims to analyze the management process of the Cargo Ship Safety Construction Certificate by PT. Putra Andalas Samudera at the Port Authority and Harbormaster Office (KSOP) Class I Dumai. This certificate is a vital document to ensure ship seaworthiness in accordance with the standards of the Directorate General of Sea Transportation. The research method used is descriptive qualitative with data collection through field observations, interviews, and document studies during the internship period. The results indicate that the management procedure is conducted digitally through the Shipping and Seafarers Information System (SIMKAPEL). Although the system is integrated, several main obstacles were found: (1) errors in uploading documents by the applicant, (2) excessive document file sizes making them unreadable by the system, (3) unstable internet connection causing server errors, and (4) delays in attaching the latest documents resulting in re-revisions. Optimization efforts are carried out by increasing the accuracy of document validation before uploading and intensive coordination between the agent, ship owner, and Marine Inspector to ensure smooth physical inspection and timely issuance of the certificate.

Keywords: KSOP Dumai, Service, Ship Agency, SNPP, Safety Construction Certificate.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam jalur perdagangan internasional. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan sektor transportasi laut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Menurut Fatimah (2019), moda angkutan laut memiliki keunikan berupa kemampuan membawa muatan dalam jumlah besar, sehingga mampu menghubungkan serta menjangkau antar wilayah melalui jalur perairan. Potensi pengembangan angkutan laut sangat besar karena perannya, baik dalam skala nasional maupun internasional, dapat mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelabuhan sebagai simpul dalam sistem transportasi laut tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersandar dan berlabuh kapal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan perdagangan antar pulau maupun antar negara.

Keselamatan pelayaran merupakan aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam industri maritim. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pelabuhan didefinisikan sebagai kawasan daratan sekaligus perairan yang dibatasi secara hukum, dijadikan tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kapal. Handoko dan Thobias (2020) menegaskan bahwa kelaiklautan kapal merupakan prasyarat mutlak sebelum kapal diizinkan untuk berlayar, yang mencakup berbagai aspek mulai dari kelaikan teknis konstruksi, keselamatan perlengkapan, hingga kompetensi awak kapal. Salah satu instrumen penting untuk menjamin kelaiklautan kapal adalah Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang yang diterbitkan oleh otoritas pelabuhan, yang menjamin bahwa struktur, material, permesinan, dan stabilitas kapal telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perusahaan keagenan kapal memiliki peran vital dalam menjembatani kepentingan pemilik kapal dengan otoritas pelabuhan. Prasetiawan (2024) menjelaskan bahwa keagenan kapal memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh dokumen administrasi kapal, terutama yang berkaitan dengan keselamatan, tetap valid dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PT. Putra Andalas Samudera sebagai salah satu perusahaan keagenan kapal di Dumai tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan pemilik kapal dalam urusan administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kapal yang diageni memenuhi persyaratan kelaiklautan sebelum melakukan kegiatan pelayaran. Sabila dan Sinaga (2023) menambahkan bahwa keterlambatan dalam pengurusan sertifikat dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan akibat waktu tunggu kapal dan biaya labuh yang bertambah.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai sebagai instansi yang berwenang dalam penerbitan sertifikat kapal telah melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. Implementasi Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan kepada masyarakat maritim. Sistem digital ini memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat dilakukan secara online, sehingga diharapkan dapat mempercepat waktu pengurusan dan mengurangi praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur.

Syamsuri et al. (2020) menyatakan bahwa pengembangan teknologi terapan dalam pelayanan publik merupakan kebutuhan mendesak di era digitalisasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan.

Dalam praktiknya, proses pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang di KSOP Dumai masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Syamsuri et al. (2020) mengungkapkan bahwa hambatan yang sering terjadi meliputi kesalahan pengunggahan dokumen oleh pemohon, ukuran file dokumen yang terlalu besar sehingga sulit terbaca oleh sistem, ketidakstabilan jaringan internet yang menyebabkan gangguan server, dan keterlambatan lampiran dokumen terbaru yang memicu revisi ulang. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memperlambat proses pengurusan sertifikat, tetapi juga berdampak pada operasional kapal dan dapat mengancam legalitas berlayar kapal. Royzaldi, Fadiyah, dan Nurmaliana (2024) menambahkan bahwa kompleksitas prosedur dan dokumentasi dalam industri maritim memerlukan koordinasi yang intensif antar berbagai pihak untuk memastikan kelancaran proses administrasi.

Optimalisasi pelayanan keagenan kapal dalam pengurusan sertifikat menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kelancaran operasional kapal dan meminimalkan kerugian ekonomi. Ferine dan Juniarti (2022) menekankan bahwa kualitas pelayanan yang optimal memerlukan koordinasi yang intensif antara berbagai pihak yang terlibat, yaitu perusahaan keagenan, pemilik kapal, petugas pemeriksa kapal, dan instansi terkait. Koordinasi yang intensif sejak sebelum kapal tiba di pelabuhan, validasi dokumen yang teliti sebelum pengunggahan, serta antisipasi terhadap potensi hambatan teknis dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengurusan sertifikat. Juliana (2025) menambahkan bahwa dalam manajemen pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan menjadi indikator utama keberhasilan perusahaan jasa, termasuk dalam bidang keagenan kapal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses optimalisasi pelayanan keagenan kapal yang dilakukan oleh PT. Putra Andalas Samudera Dumai dalam pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang di KSOP Kelas I Dumai. Penelitian ini akan mengkaji tata cara pengurusan sertifikat melalui sistem SIMKAPEL, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengurusan, serta menganalisis solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Sebagaimana ditekankan oleh Negara, Aryoga, dan Puta (2021), transformasi sistem pelayanan memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas implementasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas pelayanan keagenan kapal dan menjadi referensi bagi perusahaan keagenan lainnya dalam mengoptimalkan pelayanan pengurusan sertifikat kapal.

METODE

Pengamatan Lapangan (*Field Research*). Metode observasi dilakukan penulis dengan cara turun langsung ke PT. Putra Andalas Samudera Dumai untuk mengamati aktivitas karyawan, sekaligus meninjau kegiatan pelabuhan terkait penanganan dan pengurusan sertifikat kapal, selama melaksanakan Praktek Darat selama enam bulan penuh.

Metode Perpustakaan (*Library Research*). Pada metode ini, penulis mengumpulkan data melalui telaah bacaan dan sumber referensi yang relevan, yang mendukung pemahaman mengenai istilah serta konsep dalam makalah. Selain itu, penulis menggunakan buku pedoman kampus sebagai acuan dalam penyusunan karya ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pelayanan Jasa Keagenan Yang Dilakukan Oleh PT. Putra Andalas Samudera Dumai Dalam Pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal

Optimalisasi pelayan yang dilakukan oleh PT. Putra Andalas Samudera Dumai untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pengurusan sertifikat Keselamatan konstruksi kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan I Dumai. Untuk mengoptimalkan pelayanan jasa dalam pengurusan sertifikat kapal tersebut pihak agen akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan sertifikat tersebut, yang diharapkan mencapai hasil maksimal agar tidak ada kendala bagi kapal-kapal yang di ageni untuk melakukan kegiatan pelayaran. Sebelum kapal tiba agen akan melakukan konfirmasi kepada pihak kapal dan *owner* kapal apakah kapal yang akan datang ada dokumen yang akan di perpanjang atau akan habis masa berlakunya, jika ada maka agen akan meminta *owner* atau pihak kapal untuk mengirimkan file dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan sertifikat tersebut guna dilakukan pelaporan kepada pihak KSOP. Jika sudah dilaporkan kepada pihak KSOP maka, KSOP akan mengetahui bahwasannya ada kapal yg akan perpanjang sertifikat sehingga, pihak KSOP akan mempersiapkan apa saja yg dibutuhkan pada saat melakukan inspeksi untuk kapal yang akan sandar dan mengatur serta memperkirakan jadwal inspeksi yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan agar pengurusan lebih optimal, sehingga kapal yang datang tidak ada kendala pada saat akan melakukan pelayaran dikarenakan sertifikat ada yang mati atau perpanjangan yang terlambat dalam pengurusan. Optimalisasi pelayanan jasa keagenan dalam pengurusan sertifikat kapal sangat dibutuhkan, guna menghemat waktu labuh kapal dimana hal tersebut dapat meminimalisir biaya labuh kapal. Jika sertifikat tersebut lama dalam proses perpanjangan maka kapal tidak dapat melakukan pelayaran dan biaya labuh kapal tersebut akan bertambah dimana tidak sesuai dengan yang diperkirakan.

Tata Cara Pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan I Dumai Oleh PT. Putra Andalas Samudera Dumai.

Konstruksi kapal dibuat di galangan kapal, dimana sebelum proses pembangunan di buatkan desain dari kapal tersebut. Kemudian dilakukan yang namanya peletakan lunas kapal, selanjutnya konstruksi dan rangka gading-gading kapal, kemudian pemasangan geladak dan anjungan serta kulit kapal. Kapal yang sudah selesai dibangun akan diberikan sertifikat yaitu sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat konstruksi merupakan surat penting agar kapal bisa layak laut. Sertifikat kapal memiliki peranan penting sebagai upaya pencegahan agar tidak

terjadi kecelakaan kapal, melindungi keselamatan manusia dan muatan, menjaga keamanan harta benda, serta menghindari risiko pencemaran pada lingkungan laut.

Tata cara pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang yang habis masa berlaku:

1. *Owner* kapal mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan PT. Putra Andalas Samudera Dumai dan mengirimkan surat permintaan perpanjangan sertifikat kapal, setelah pihak agen menerima surat permintaan, selanjutnya agent melakukan permohonan dan penginputan dokumen melalui sistem SIMKAPEL yang di tujukan ke pada pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan I Dumai. Dalam penginputan tersebut pihak agen melampirkan persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan perpanjangan dari PT. Putra Andalas Samudera Dumai.
 - b. Melampirkan Surat Laut.
 - c. Melampirkan Surat Ukur.
 - d. Melampirkan Sertifikat Keselamatan Konstruksi.
 - e. Melampirkan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan.
 - f. Melampirkan Sertifikat Keselamatan Radio.
 - g. Melampirkan Sertifikat Klasifikasi Mesin dan Lambung.
 - h. Melampirkan Sertifikat Garis Muat.
 - i. Melampirkan Sertifikat *Liferaft*.
 - j. Melampirkan Sertifikat *Fire Extingisher*.
2. Setelah di input pihak syahbandar menerima permohonan tersebut.
3. Kemudian pihak SHSK memverifikasi dan memeriksa sertifikat yang di input oleh agent melalui sistem SIMKAPEL dan menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Setelah di konfirmasi dokumen sesuai bidang SHSK menunjuk petugas *Marine Inspector* untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan fisik kapal.
5. *Marine Inspector* melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh berkas dan administrasi serta fisik kapal.
6. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (KASI SHSK).
7. KASI SHSK menerima laporan hasil pemeriksaan dan memberi paraf di laporan hasil pemeriksaan serta tanda tangan di lampiran sertifikat.
8. Pihak KASI SHSK menyerahkan lampiran sertifikat ke KABID SHSK (Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikat Kapal) untuk penentuan masa berlaku sertifikat yang diperpanjang.
9. Lampiran dari sertifikat yang sudah ditentukan masa berlakunya akan di serahkan ke staf SHSK untuk diketik oleh staf dan diberi penomoran sertifikat.
10. Kemudian Staf SHSK menyerahkan sertifikat yang telah di beri nomor kepada KASI SHSK untuk diparaf.
11. KASI SHSK menyerahkan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang kepada KABID SHSK untuk ditandatangani.

12. Setelah sertifikat ditandatangani oleh KABID SHSK sertifikat akan disahkan atau dicapai oleh staf SHSK.
13. Pihak staf SHSK mengkonfirmasi kepada pihak agent bahwasannya sertifikat telah selesai dan siap untuk di lakukan penjemputan.

Adapun arti dalam singkatan-singkatan yang tertulis didalam pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang berupa:

SIMKAPEL	: Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan
KABID	: Kepala Bidang
KASI	: Kepala Sesi
SHSK	: Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
STAF	: Staf atau orang yang berkerja di bidang status hokum dan sertifikasi kapal

Dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang dibutuhkan 3 hari kerja sesuai jadwal, dengan catatan hasil dari laporan pemeriksaan, dinyatakan layak laut, hasil pemeriksaan sesuai, tidak terdapat kekurangan dan jarak tempuh dari lokasi pemeriksaan masih dapat terjangkau, sehingga mempersingkat waktu pemeriksaan.

Dokumen Pendukung Dalam Pengurusan Sertifikat Keselamatann Konstruksi Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan I Dumai.

1. Surat Laut
Surat laut kapal merupakan surta tanda kebangsaan kapal itu sendiri dimana surat laut tersebut berfungsi sebagai dokumen kepemilikan atas kapal tersebut.
2. Surat Ukur Kapal
Surat ukur kapal adalah dokumen resmi berisi ukuran serta tonase kapal yang diperoleh dari hasil pengukuran, kemudian dicatat secara detail dalam surat tersebut.
3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi kapal
Sertifikat keselamatan konstruksi memuat pernyataan, jika kapal tersebut telah di periksa sesuai dengan persyaratan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari hasil pemeriksaan kondisi konstruksi, mesin, maupun perlengkapan lainnya yang telah di tetapkan oleh peraturan mendapatkan hasil yang layak dan memuaskan.
4. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan
Sertifikat keselamatan perlengkapan merupakan sertifikat yang di dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi dimana dinyatakan bahwa peralatan-peralatan keselamatan kapal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Sertifikat Keselamatan Radio
Sertifikat keselamatan radio merupakan bukti bahwa kapal dilengkapi perangkat pemancar dan penerima radio yang sesuai dengan aturan keselamatan pelayaran.
6. Sertifikat Klasifikasi Mesin

Sertifikat klasifikasi mesin adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga klasifikasi, seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

7. Sertifikat Klasifikasi Lambung

Sertifikat klasifikasi lambung menyatakan kelayakan bagian lambung kapal, dengan batas timbul minimum maupun maksimum yang diperbolehkan di atas permukaan air.

8. Sertifikat Garis Muat

Sertifikat garis muat adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menetapkan batas maksimum pemuatan barang ke atas kapal setelah memenuhi syarat teknis.

9. Sertifikat *Liferaft*

Sertifikat *liferaft* merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah di lengkapi alat-alat keselamatan yang memadai untuk meninggalkan kapal pada saat kapal keadaan darurat.

10. Sertifikat *Fire Extinguisher*

Sertifikat *fire extinguisher* merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut sudah di lengkapi alat-alat keselamatan pada saat terjadinya kebakaran di atas kapal.

Instansi Yang Terkait Dalam Pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan I Dumai Oleh PT. Putra Andalas Samudera Dumai.

1. Kesyahbaandaran dan Otoritas Pelabuhan I Dumai

Syahbandar merupakan suatu bidang yang sangat penting dan berwenang dalam mengeluarkan dan menerbitkan, SPB (Surat Persetujuan Berlayar), SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak), perpanjangan sertifikat kapal, serta pengawasan keselamatan pelayaran dan memastikan kapal yang akan berlayar maupun masuk ke pelabuhan dumai harus memenuhi standar dan syarat layak laut, baik itu kapal lokal maupun kapal berbendera asing. Adapun tugas- tugas dari syahbandar sendiri yaitu:

- a. Mengawasi keselamatan berlayar, pemantaun kinerja operasional pelabuhan, serta alur pelayaran dan area kolam labuh.
- b. Memastikan dokumen, surat-surat kapal dan dokumen awak kapal lengkap serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- c. Mengeluarkan surat persetujuan berlayar kepada kapal yang telah melakukan *clearance* dari instansi yang terkait.
- d. Mengawasi kapal-kapal yang akan melakukan kegiatan olah gerak kapal maupun kapal yang akan melakukan tender.

2. Biro Klasifikasi Indonesia

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) suatu instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan *survey* serta menetapkan dan mengklasifikasikan kapal berdasarkan lambung dan permesinan kapal yang dijadikan sebagai acuan dan jaminan untuk

pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dalam peraturan penerapan perbaikan kapal.

Kapal-Kapal yang sudah memiliki klasifikasi, wajib melakukan *survey* yang telah dipersyaratkan untuk mempertahankan status klasifikasinya. Apabila klasifikasi tersebut tidak dipenuhi, maka pihak BKI akan melakukan penangguhan (*suspend*) atau mencabut status klasifikasi atas penyimpangan dari persyaratan yang telah ditentukan. Untuk kapal yang sudah dicabut status klasifikasinya mungkin akan dicabut sementara ataupun permanen. Hal tersebut berlaku juga bagi kapal-kapal yang tidak melakukan kegiatan *survey* secara periodik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan klasifikasi.

Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.

Hambatan yang muncul dalam proses pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang oleh PT. Putra Andalas Samudera Dumai kerap menjadi tantangan besar. Sebagai perusahaan pelayaran yang bergerak dalam layanan tertentu dengan tujuan menghasilkan kinerja optimal, harapan akan hasil maksimal tidak selalu tercapai. Pada praktiknya, dalam menangani administrasi sertifikat kapal berbendera Indonesia, sering timbul kendala yang memperlambat penyelesaian. Permasalahan yang kerap ditemui mencakup dokumen persyaratan yang tidak lengkap, sistem digital yang mengalami gangguan sehingga kode *billing* tertunda, hingga hasil inspeksi yang tidak sesuai standar. Semua hambatan ini berdampak langsung pada keterlambatan proses perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang.

Adapun hambatan – hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang melalui sistem SIMKAPEL.

1. Dokumen yang tidak lengkap pada saat penginputan
2. Hasil inspeksi yang tidak sesuai sehingga perpanjangan tidak bisa di lanjutkan
3. Kode *billing* yang keluar lambat sehingga menghambat untuk pembayaran (PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyelesaian Masalah Dalam Pengurusan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.

Dalam menangani dan mengurangi kendala- kendala yang sering dihadapi, maka perlu dilakukan pengoptimalisasian atau antisipasi serta solusi untuk menyelesaikan masalah maka bagian operasional perusahaan khususnya dalam menangani pengurusan sertifikasi kapal harus sering- sering berkoordinasi dengan pihak kapal dalam pelengkapan dokumen serta bagian keuangan untuk mengupdate pemberitahuan serta proses pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang untuk mengantisipasi terlambat dalam pembayaran tagihan PNBP yang dapat menghambat pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang. Kemudian untuk kelengkapan dokumen dan perlengkapan kapal maka pihak agent yang menangani pengurusan sertifikat kapal harus berkordinasi dengan pihak *owner* kapal agar melengkapi alat – alat

keselamatan konstruksi kapal dan apabila terjadi kekurangan pada saat pemeriksaan maka pihak agent akan membuat surat pernyataan bahwasannya pihak *owner* akan melengkapi kekurangan alat – alat keselamatan konstruksi kapal barang tersebut, agar pengurusan sertifikat dapat berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Optimalisasi pelayanan jasa keagenan kapal dalam pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan I Dumai oleh PT. Putra Andalas Samudera Dumai telah berjalan cukup efektif serta efisien namun masih ditemukan beberapa hambatan seperti dokumen persyaratan yang tidak lengkap pada saat penginputan, kode *billing* yang lama keluar, hingga adanya perbedaan hasil inspeksi yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan sertifikat. Agar optimalisasi pelayanan jasa keagenan kapal dalam pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai oleh PT. Putra Andalas Samudera Dumai berjalan dengan lancar, disarankan untuk pihak agen, pihak kapal dan pemilik kapal untuk melengkapi seluruh dokumen untuk penginputan, melakukan perawatan jaringan dan sistem secara berkala, serta memastikan kelengkapan kapal saat inspeksi, agar pengurusan sertifikat berjalan dengan optimal.

RUJUKAN

- Fatimah, S. (2019). Pengantar Transportasi. Jawa Timur: Myriapublisher.
- Ferine, K. F., & Juniarti. (2022). Pelayanan SDM. Yogyakarta: Selat Media Patners.
- Handoko, W., & Thobias, F. W. (2020). Hukum Maritim dan Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- HUSNIYAH, H., SYARIFUR, R., DINA, R., & FADIYAH, H. S. (2023). Mekanisme bill of lading pengapalan muatan curah cair kapal tanker oleh PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *MASIP: JURNAL MANAJEMEN ADMINISTRASI BISNIS DAN PUBLIK TERAPAN* *Учпедумелу: Politeknik Kampar*, 1(3), 216-225.
- IQBAL, A. P., DINA, R., & FADIYAH, H. S. (2024). FLOW OF CONTAINER MOVEMENT ACTIVITIES AT THE DEPOT PT. PRIMA INDONESIA LOGISTICS. *JURNAL RISET DAN INOVASI MANAJEMEN* *Учпедумелу: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 2(3), 225-232.
- Juliana. (2025). Manajemen Pemasaran Jasa. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Negara, G. A. J., Aryoga, I. N., & Puta, I. N. B. A. (2021). Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan. Bali: Mertajati Widya Mandala.

- Pane, H. C., Ginting, D., & Sabila, F. H. (2024). Sistem pengembalian dan pengambilan container empty di depo PT. Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 1(2), 49-53.
- Prasetiawan, A. (2024). *Bisnis Keagenan Kapal*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22-25.
- ROBINARIA, N., & FADIYAH, H. S. (2024). PROSES PENERBITAN DOKUMEN PORT HEALTH QUARANTINE CLEARANCE (PHQC) KESEHATAN KAPAL PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I OLEH PT. TARUNACIPTA KENCANA CABANG DUMAI. *MAESWARA: JURNAL RISET ILMU MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN* *Yupedumelu: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 2(5), 123-133.
- ROYZALDI, R., FADIYAH, H. S., & NURMALIANA, S. S. (2024). PERANAN FREIGHT FORWARDING DALAM PENGURUSAN DOKUMEN EKSPOR PADA PT. SAMUDERA LAUTAN LUAS MEDAN. *JURNAL MANAJEMEN*, 1(4), 31-42.
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur Penyandaran Kapal Sandar Tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D. I. R. H. A. M. S. Y. A. H., Yuna, S. U. T. R. I. A., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe*, 1(2), 1-6.
- Sibagariang, A. R., Ridho, S., & Dirhamsyah, F. H. S. (2023). Procedure For Managing Export And Import Documents By PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan. *GLOBE*, 1(4).
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861-866.
- Syamsuri, Y., et al. (2020). *Pengembangan Teknologi Terapan Berwawasan Lingkungan*. Jawa Timur: Ma Chung Press.
- Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor: PM. 59 tahun 2021 (Bab 1 Pasal 1 Nomor 28) Tentang Pengertian Kapal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.